

“The Empire Writes Back” dalam Konteks Orde Baru: Perlawanan Moral dalam Novel Orang-Orang Proyek

Farihatun Ni'mah¹, Novia Adibatus Shofah²
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya¹
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya²
farihahmad.30@gmail.com
nashofah@uinsa.ac.id

Abstract:

This article aims to analyze forms of moral resistance in Ahmad Tohari's novel Orang-Orang Proyek by employing Bill Ashcroft's postcolonial perspective, particularly the concept of “The Empire Writes Back.” The study focuses on how the Orde Baru regime reproduces colonial patterns of power within a domestic context through a project-based development system that positions the ruling elite as the dominant group while marginalizing ordinary people. The research adopts a qualitative descriptive method with literary text analysis, examining textual excerpts that represent power relations, practices of marginalization, and the characters' responses to structural injustice. The findings reveal that the novel portrays three key aspects: first, the presence of political and economic domination that generates social inequality; second, the victimization of marginalized figures such as Kabul, Pak Tarya, and Martasatang within a corrupt development system; and third, the emergence of moral resistance manifested through honesty, spiritual awareness, and a rejection of injustice. These forms of resistance reflect the discourse of resistance articulated by Bill Ashcroft in The Empire Writes Back, namely the efforts of marginalized subjects to challenge dominant power structures through moral values and ethical actions. Thus, Orang-Orang Proyek can be read as a critique of Orde Baru power practices that continue to inherit and reproduce colonial patterns within the nation-state.

Keywords: postcolonialism; The Empire Writes Back; moral resistance; Orde Baru; Orang-Orang Proyek

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlawanan moral dalam novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari dengan menggunakan perspektif poskolonial Bill Ashcroft, khususnya konsep *The Empire Writes Back*. Kajian ini berfokus pada bagaimana praktik kekuasaan Orde Baru mereproduksi pola kolonial dalam konteks domestik melalui sistem pembangunan proyek yang menempatkan elite penguasa sebagai pihak dominan dan rakyat kecil sebagai kelompok terpinggirkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis teks sastra terhadap kutipan-kutipan yang merepresentasikan relasi kuasa, praktik marginalisasi, serta respons tokoh terhadap ketidakadilan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel ini menggambarkan tiga hal penting: pertama, adanya dominasi politik dan ekonomi yang memunculkan ketimpangan sosial; kedua, rakyat kecil seperti Kabul, Pak Tarya, dan Martasatang menjadi korban dari sistem pembangunan yang korup; dan ketiga, muncul bentuk perlawanan moral berupa kejujuran, kesadaran

spiritual, dan sikap menolak ketidakadilan. Bentuk perlawanan ini menunjukkan adanya *resistance discourse* sebagaimana dijelaskan Bill Ashcroft dalam konsep *The Empire Writes Back*, yaitu upaya pihak terpinggirkan untuk melawan dominasi kekuasaan melalui nilai dan tindakan moral. Dengan demikian, *Orang-Orang Proyek* dapat dibaca sebagai bentuk kritik terhadap praktik kekuasaan Orde Baru yang masih mewarisi pola kolonial di dalam negeri.

Kata kunci: poskolonialisme; *The Empire Writes Back*; perlawanan moral; Orde Baru; *Orang-Orang Proyek*

PENDAHULUAN

Masa Orde Baru dikenal sebagai periode ketika pembangunan nasional dijadikan dasar utama dalam menjalankan pemerintahan. Melalui slogan “pembangunan” pemerintah berusaha menampilkan citra kemajuan dan modernisasi bangsa. Namun, dibalik semangat tersebut tersembunyi praktik kekuasaan yang bersifat sentralistik dan hegemonik. Pemerintah pusat mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat dan menjadikan pembangunan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan. Dalam pelaksanaannya kebijakan pembangunan seringkali hanya menguntungkan kelompok elit, sementara rakyat kecil menjadi korban proyek-proyek yang tidak berpihak kepada mereka.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pada masa Orde Baru tidak sekadar berfungsi sebagai upaya ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen ideologi kekuasaan. Melalui proyek-proyek pembangunan negara memposisikan diri sebagai penguasa yang menentukan arah kehidupan rakyat, sehingga membentuk pola dominasi yang menyerupai sistem kolonial. Dalam konteks ini Orde Baru dapat dikatakan melahirkan bentuk kolonialisme internal, yaitu situasi ketika negara menindas rakyatnya sendiri melalui sistem politik dan ekonomi yang meniru struktur kekuasaan kolonial Barat.

Kondisi sosial-politik ini kemudian mendapat respons dari kalangan sastrawan Indonesia yang menggunakan karya sastra sebagai sarana untuk menyuarakan kritik terhadap penyimpangan kekuasaan. Salah satu pengarang yang konsisten mengangkat persoalan sosial yang tidak adil adalah Ahmad Tohari. Novel *Orang-Orang Proyek* menjadi salah satu karya penting yang menggambarkan praktik kekuasaan dan korupsi dalam sistem proyek pembangunan. Melalui tokoh Kabul, seorang insinyur idealis dan Pak Tarya rakyat desa yang jujur dan sederhana, Ahmad

Tohari menampilkan benturan antara moralitas rakyat kecil dengan sistem kekuasaan yang korup. Relasi antara pejabat proyek seperti Dalkijo dan GLM sebagai representasi *the center* dan Martasatang dan rakyat desa sebagai *the margins* sehingga mencerminkan struktur kekuasaan yang tidak jauh berbeda dengan sistem kolonial.

Teori poskolonial Bill Ashcroft digunakan untuk menjelaskan bahwa kolonialisme tidak hanya berhenti setelah masa penjajahan berakhir, tetapi meninggalkan cara berpikir dan sistem kekuasaan yang terus diwariskan (Fitriadin, 2021). Dalam karya *The Empire Writes Back* (Ashcroft et al., 1989), Ashcroft menjelaskan bahwa kolonialisme meninggalkan warisan ideologis yang sering kali meniru pola kolonial yaitu masih mempertahankan hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Pola hubungan ini dapat terus muncul di negara pascakolonial dalam bentuk sistem politik dan ekonomi yang masih mempertahankan logika dominasi. Menurut Bill Ashcroft, Melalui teori ini, kita bisa memahami bagaimana sistem kekuasaan dalam negeri juga bisa bertindak layaknya penjajah, seperti yang tergambar dalam novel *Orang-Orang Proyek*.

Bill Ashcroft juga memperkenalkan gagasan *the empire writes back*, yaitu upaya kelompok terpinggirkan untuk menulis balik terhadap pusat kekuasaan melalui *resistance discourse*. Dalam novel ini, Ahmad Tohari menghadirkan tokoh-tokoh seperti Kabul, Samad dan Pak Tarya sebagai representasi rakyat kecil yang menolak sistem korup pada masa Orde Baru. Mereka berpegang pada nilai-nilai kejujuran, spiritualitas dan kemanusiaan sebagai bentuk perlawanan terhadap ideologi kekuasaan yang menindas. Melalui narasi ini, Ahmad Tohari seakan menulis balik terhadap wacana pembangunan negara dengan menegaskan nilai-nilai moral rakyat sebagai bentuk resistensi terhadap pusat kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengungkap praktik kolonialisme sistem Orde Baru sebagaimana direpresentasikan dalam novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari melalui perspektif teori poskolonial Bill Ashcroft dengan konsep *the empire writes back*. Penelitian ini juga bertujuan untuk menafsirkan bentuk-bentuk *resistance discourse* yang muncul dalam teks sebagai kritik terhadap sistem kekuasaan yang menindas. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan *Orang-Orang Proyek* bukan hanya sebagai kisah tentang pembangunan, tetapi sebagai

teks poskolonial yang memperlihatkan bagaimana praktik kolonial masih berlangsung di dalam negara sendiri sebagai bentuk kolonialisme internal yang tersembunyi di balik wacana pembangunan pada era Orde Baru.

KAJIAN PUSTAKA

Setelah masa penjajahan berakhir bentuk baru kolonialisme muncul dari sistem yang mempertahankan pola kekuasaan kolonial melalui kontrol ekonomi, politik, dan budaya tanpa penjajahan fisik. Menurut Bill Ashcroft, kolonialisme tidak lagi berbicara tentang dominasi antara kulit putih dan kulit hitam, tetapi tentang bagaimana kekuasaan dapat muncul di dalam bangsa sendiri. Praktik kolonial dapat terus hidup ketika penguasa negara justru menindas rakyatnya melalui sistem politik dan ekonomi yang meniru logika kekuasaan kolonial Barat. Dalam konteks *Novel Orang-Orang Proyek* hal ini tampak pada masa Orde Baru, ketika pemerintah menggunakan ideologi pembangunan yang sentralistik dan hegemonik sehingga melahirkan bentuk kolonialisme internal di mana negara berperan sebagai penjajah terhadap rakyatnya sendiri.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari dengan berbagai pendekatan. (Arifin et al., 2024) meneliti aspek nilai moral dan kemanusiaan, menunjukkan bahwa novel ini mengandung pesan kejujuran dan keadilan sebagai bentuk kritik terhadap perilaku korupsi. (Juliana, 2022) melalui pendekatan sosiologi sastra menyoroti refleksi permasalahan sosial dan politik yang muncul akibat sistem pembangunan Orde Baru. Sementara itu, (Garcia et al., n.d.) menggunakan analisis wacana kritis Michel Foucault untuk mengungkap praktik hegemoni dan relasi kuasa antara pejabat proyek dan rakyat desa. Kajian lain oleh (Az, 2019) menelusuri simbol-simbol dehumanisasi, yaitu hilangnya nilai kemanusiaan akibat sistem pembangunan yang tidak adil. (Suaka et al., 2023) menggunakan teori dekonstruksi Jacques Derrida untuk membongkar praktik korupsi dalam proyek pembangunan sebagai bentuk penyelewengan struktural pada masa Orde Baru. Selain itu, studi hegemoni sosial politik oleh (Mahadi, 2020) memperlihatkan bentuk-bentuk dominasi dan pengaruh kekuasaan yang dijalankan secara halus melalui ideologi dalam novel *Orang-Orang Proyek*.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek moral, sosial dan politik dalam *Orang-Orang Proyek*, namun

belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji novel ini melalui perspektif poskolonial Bill Ashcroft. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada kritik sosial dan moral atau menggunakan teori hegemoni dan dekonstruksi yang menyoroti aspek kekuasaan dalam batas sosial belum sampai pada pembacaan ideologis tentang bagaimana kekuasaan Orde Baru mereproduksi struktur kolonial dalam negara itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian terhadap bentuk-bentuk kolonialisme baru yang muncul di dalam satu negara menjadi relevan untuk dilakukan.

Dengan menggunakan teori poskolonial Bill Ashcroft penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa novel *Orang-Orang Proyek* tidak hanya merepresentasikan ketimpangan sosial, tetapi juga menggambarkan bagaimana negara menjadi kekuatan kolonial terhadap rakyatnya sendiri melalui wacana pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pembacaan baru yang menempatkan *Orang-Orang Proyek* sebagai teks poskolonial *resistance discourse* terhadap kekuasaan negara sesuai dengan semangat Ashcroft bahwa “*the postcolonial text always speaks back to the empire*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, karena berupaya mendeskripsikan makna dan realitas sosial yang tercermin dalam karya sastra secara naratif dan interpretatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan poskolonial dengan menggunakan teori Bill Ashcroft. Teori ini menekankan relasi antara *the center*, *the margins* serta *resistance discourse* yang merupakan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana praktik kolonialisme sistem Orde Baru direpresentasikan dalam novel *Orang-Orang Proyek*.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari. Novel ini dipilih karena merepresentasikan praktik kekuasaan, korupsi dan ketimpangan sosial yang muncul akibat proyek pembangunan pada masa Orde Baru. Data penelitian berupa kutipan-kutipan teks, baik berupa narasi, dialog, maupun deskripsi tokoh yang menunjukkan relasi kekuasaan antara pejabat proyek dan rakyat desa, ideologi pembangunan yang menindas serta bentuk

resistensi moral dan spiritual rakyat kecil terhadap sistem kekuasaan. Sumber data sekunder diperoleh dari buku teori, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan, termasuk karya Bill Ashcroft (Ashcroft et al., 1989) serta kajian-kajian tentang *Orang-Orang Proyek* yang menyoroti aspek sosial, politik, dan ideologinya (Ashcroft et al., 1989).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode baca dan catat. Peneliti membaca teks novel secara cermat dan berulang untuk menemukan bagian-bagian yang memuat unsur kekuasaan, dominasi, serta perlawanan terhadap kekuasaan. Data yang relevan kemudian dicatat, diklasifikasikan, dan dikelompokkan sesuai dengan aspek teori poskolonial Bill Ashcroft, yaitu representasi *the center*, representasi *the margins*, dan bentuk *resistance discourse* (Ashcroft et al., 2024). Proses pembacaan dilakukan secara intensif agar interpretasi yang diperoleh benar-benar merefleksikan makna yang terkandung dalam teks.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori poskolonial yang berlandaskan pada konsep-konsep utama Bill Ashcroft. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) mengidentifikasi data yang menunjukkan relasi kekuasaan kolonial dalam teks; (2) mengklasifikasikan data berdasarkan kategori *the center*, *the margins* dan *resistance discourse*; (3) menafsirkan makna sosial, politik, dan ideologis dari kutipan teks; serta (4) menarik kesimpulan mengenai bagaimana novel *Orang-Orang Proyek* merepresentasikan praktik kolonialisme sistem Orde Baru. Analisis ini menempatkan teks sastra sebagai wacana poskolonial yang berupaya *to write back to the empire*, yakni menulis balik terhadap kekuasaan dominan melalui penguatan nilai-nilai moral, spiritualitas dan kemanusiaan rakyat kecil.

Dengan demikian, metode penelitian ini digunakan untuk mengungkap secara mendalam bagaimana praktik kolonial dalam sistem Orde Baru direpresentasikan dan dilawan melalui struktur naratif dalam novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pembacaan terhadap teks sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai representasi sosial dan ideologis dari kondisi poskolonial masa Orde Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari merepresentasikan keadaan sosial pada masa Orde Baru ketika pembangunan dijadikan simbol kemajuan bangsa. Dalam novel ini praktik kekuasaan, korupsi dan ketimpangan sosial muncul di balik proyek pembangunan jembatan di Sungai Cibawor yang menjadi latar utama cerita. Relasi antara pejabat proyek dan rakyat desa memperlihatkan adanya tataran kekuasaan yang menempatkan pihak penguasa sebagai dominan dan rakyat kecil sebagai pihak yang terpinggirkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun suatu negara telah merdeka, pola relasi kolonial masih berlangsung dalam bentuk baru yaitu dominasi penguasa terhadap rakyatnya sendiri. Melalui kisah Kabul, Pak Tarya, dan tokoh-tokoh lain Ahmad Tohari menghadirkan kritik terhadap sistem kekuasaan yang menindas rakyat atas nama pembangunan, sehingga novel ini merefleksikan bentuk kolonialisme internal sebagaimana dijelaskan Bill Ashcroft dalam perspektif poskolonial.

a. Representasi *The Center* dalam Sistem Orde Baru pada Proyek Pembangunan Jembatan Cibawor

Praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam proyek pembangunan digambarkan dengan jelas melalui perilaku pejabat proyek yang bergabung dengan partai penguasa. Novel *Orang-Orang Proyek* menampilkan bagaimana proyek negara tidak lagi dijalankan untuk kepentingan masyarakat, tetapi menjadi sarana memperkaya diri dan memperkuat kekuasaan politik. Hal ini tergambar dalam kutipan berikut:

“Penguasa yang punya proyek dan para pemimpin politik lokal menghendaki jembatan itu selesai sebelum Pemilu 1992. Karena, saya kira, peresmianya akan dimanfaatkan sebagai ajang kampanye partai golongan penguasa. Menyebalkan. Dan inilah akibatnya bila perhitungan teknis-ilmiah dikalahkan oleh perhitungan politik.” (Tohari, 2015, p. 11)

Kutipan tersebut memperlihatkan bagaimana proyek pembangunan jembatan Cibawor dijalankan bukan atas dasar kebutuhan masyarakat, melainkan demi kepentingan politik kelompok berkuasa. Penguasa proyek dan elit lokal

menggunakan proyek publik sebagai sarana kampanye untuk memperkuat citra partai mereka menjelang Pemilu 1992. Kalimat *“perhitungan teknis-ilmiah dikalahkan oleh perhitungan politik”* menunjukkan bahwa aspek profesionalisme dan tanggung jawab sosial telah dikesampingkan demi kepentingan ideologis.

Kritik terhadap kekuasaan yang menindas dalam sistem proyek Orde Baru juga muncul melalui tokoh Samad yang secara langsung mempertanyakan watak kekuasaan negara. Dalam salah satu percakapan, Samad meluapkan kemarahannya terhadap perilaku pejabat yang sewenang-wenang dan merasa selalu benar. Hal tersebut tergambar dalam kutipan berikut:

“Brengsek!” Samad mulai terbakar emosinya. “Negara dan pejabat negara merasa dirinya tak bisa salah? Itu kan kultur negara kerajaan yang feodal? Apa kita yang sudah 45 tahun menjadi negara republik masih berjiwa feodal? Apa kamu kira negara kita yang konon berPancasila ini, dan yang semua aparatnya sudah ditatar P4, adalah negara republik demokrasi? Bangun, bangun! Hentikan mimpimu. Dan sadarlah di tahun 1991 ini kita hidup di bawah orde feodal baru.” (Tohari, 2015, p. 126)

Melalui ungkapan Samad menunjukan bahwa kekuasaan negara pada masa Orde Baru masih dijalankan dengan pola feodalisme yang menyerupai masa kolonial. Negara yang seharusnya demokrasi justru mempertahankan struktur kekuasaan yang hierarkis dan anti-kritik. Frasa *“negara dan pejabat negara merasa dirinya tak bisa salah”* menunjukkan sikap arogan dan absolut penguasa terhadap rakyatnya, sedangkan istilah *“orde feodal baru”* menegaskan bahwa semangat kolonial masih hidup dalam sistem kekuasaan modern.

Dalam kerangka teori poskolonial Bill Ashcroft, perilaku seperti ini mencerminkan keberlanjutan struktur kolonial yang disebut *the continuity of colonial discourse*, dimana penguasa menjadi *the center* yang menindas rakyat sebagai *the margins*. Meskipun bangsa telah merdeka, sistem kekuasaan tetap mempertahankan logika kolonial melalui ideologi, birokrasi, dan pembangunan yang bersifat hegemonik. Melalui tokoh Samad merupakan bentuk penyuaran kesadaran kritis terhadap bentuk kolonialisme internal yang berarti bahwa kekuasaan negara telah menjadi alat penindasan baru yang meminggirkan nilai kemanusiaan dan keadilan

sosial. Selain dari kutipan diatas ada pula doktrin politik yang dilakukan partai Golongan Lestari Menang (GLM), seperti dalam kutipan berikut:

“Kepada seluruh warga hendaknya dikatakan mereka hanya punya satu pilihan yang tepat, yaitu Golongan Lestari Menang alias Orde Baru. Karena, selain GLM, isinya cuma politikus-politikus tukang omong kosong. Sedangkan kita, GLM, jagonya pembangunan. Maka ketua dewan pembina kita digelari Bapak Pembangunan. Iya, kan?” (Tohari, 2015, p. 91)

Kutipan tersebut memperlihatkan bagaimana aparat negara menanamkan doktrin politik tunggal yang mewajibkan rakyat untuk mendukung partai Golongan Lestari Menang (GLM) yang merupakan representasi ironis dari partai penguasa Orde Baru, Golkar. Pernyataan *“hanya punya satu pilihan yang tepat”* menunjukkan bentuk hegemoni ideologis di mana rakyat diarahkan untuk tunduk kepada satu kekuasaan tanpa ruang bagi perbedaan pandangan politik. Sebutan *“Bapak Pembangunan”* yang dilekatkan pada ketua dewan pembina memperkuat kultus individu terhadap pemimpin Orde Baru di mana wacana pembangunan dijadikan simbol legitimasi kekuasaan.

Dalam perspektif poskolonial Bill Ashcroft tindakan tersebut mencerminkan konsep *the center*, yakni pihak yang menguasai wacana dan menentukan kebenaran tunggal dalam masyarakat. Partai penguasa dan aparat negara menjadi representasi pusat kekuasaan yang menindas rakyat melalui ideologi pembangunan. Ungkapan *“kita jagonya pembangunan”* menandakan bagaimana kekuasaan menggunakan narasi pembangunan untuk membenarkan dominasi politik dan menutupi ketimpangan sosial. Dengan demikian melalui kutipan tersebut dapat menyingkap praktik kolonialisme internal, ketika penguasa negara berperan layaknya penjajah yang menundukkan rakyat dengan wacana kemajuan dan stabilitas semu.

Selain praktik kolonial yang masih berlangsung dan menjadi budaya dalam pembangunan jembatan Cibawor, terdapat tindakan korup dan penyelewengan anggaran yang menjadikan penyalahgunaan kuasa dalam proses pembangunan, seperti dalam kutipan berikut:

“Mandor yang mencatat penerimaan material pun pandai bermain. Dia bisa bermain dengan menambah angka jumlah pasir atau batu kali yang masuk. Truk yang masuk sepuluh kali bisa dicatat menjadi lima belas kali, dan untuk kecurangan itu dia menerima suap dari para sopir.” (Tohari, 2004, hlm. 30)

Kutipan ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat tinggi, tetapi juga terjadi di lapisan bawah sebagai akibat dari sistem yang sudah rusak secara struktural. Mandor yang seharusnya menjalankan tugas administratif justru ikut memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perbuatan *“menambah angka jumlah pasir atau batu kali yang masuk”* dan menerima *“suap dari para sopir”* menunjukkan adanya normalisasi perilaku koruptif yang dianggap wajar dalam sistem proyek. Hal ini menggambarkan bagaimana nilai kejujuran dan tanggung jawab telah digantikan oleh budaya pragmatis dan oportunistik yang lahir dari sistem kekuasaan yang permisif.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Ahmad Tohari melalui novel *Orang-Orang Proyek* merepresentasikan pejabat proyek, birokrat, dan partai penguasa sebagai wujud *the center* dalam struktur kekuasaan Orde Baru. Proyek pembangunan digambarkan tidak lagi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melainkan sebagai instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan dan legitimasi ideologis. Wacana pembangunan digunakan sebagai topeng untuk menutupi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang berlangsung secara sistemik. Melalui gambaran tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan negara pada masa Orde Baru masih mereproduksi logika kolonial dalam bentuk *kolonialisme internal*, di mana penguasa bertindak sebagai pusat dominasi yang menindas rakyat sebagai pihak pinggiran (*the margins*).

b. Praktik Marginalisasi terhadap Tokoh Kabul, Martasatang dan Pekerja dalam Sistem Proyek Orde Baru

Pembangunan jembatan dalam novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari menggambarkan bagaimana rakyat kecil menjadi korban dari kebijakan pembangunan yang tidak berpihak. Tokoh Martasatang merupakan figur sentral yang mewakili penderitaan rakyat desa akibat proyek negara. Dalam kutipan:

“Dan ini... rakitnya harus ditambatkan, karena orang tidak memerlukannya lagi. Padahal rakit adalah satu-satunya sumber penghasilannya” serta *“Setelah jembatan itu jadi, rakit-rakit itu tidak diperlukan lagi. Kang Martasatang kehilangan pekerjaannya. Tapi pejabat proyek tidak peduli”* (Tohari, 2015, p. 153).

Dari kutipan tersebut tampak jelas bentuk marginalisasi struktural yang dialaminya. Sebagai penyeberang rakit, Martasatang menggantungkan hidup sepenuhnya pada sungai. Namun, proyek pembangunan jembatan yang didanai dan dikelola oleh negara menghapus mata pencaharian itu tanpa memberi solusi. Ia kehilangan pekerjaan, pendapatan serta harga diri sebagai kepala keluarga. Ahmad Tohari dengan sengaja menampilkan sikap pejabat proyek yang “tidak peduli” untuk menunjukkan hilangnya dimensi kemanusiaan dalam kebijakan pembangunan. Rakyat seperti Martasatang diperlakukan hanya sebagai angka dalam laporan keberhasilan proyek, bukan sebagai manusia yang memiliki kehidupan sosial dan emosional. Di sini, pembangunan tidak sekadar merusak ekonomi rakyat, tetapi juga mencabut identitas sosial mereka sebagai bagian dari komunitas yang selama ini hidup harmonis dengan alam.

Selain Martasatang yang kehilangan sumber penghasilan, Eksploitasi terhadap pekerja dalam sistem pembangunan Orde Baru tergambar dengan jelas melalui nasib para pekerja dalam novel *Orang-Orang Proyek* dalam kutipan:

“Dan di proyek ini mereka digaji terlalu kecil karena pos anggaran untuk gaji mereka tertekan oleh besarnya faktor X yang harus ditanggung pelaksana proyek. Faktor X ini adalah pungutan liar, halus maupun kasar, langsung maupun tak langsung, yang dilakukan oleh oknum-oknum resmi sipil dan tentara, orang partai, preman-preman, serta tokoh-tokoh lokal yang menganggap proyek itu memang”proyek” (Tohari, 2015, p. 68)

Kutipan tersebut menampilkan bagaimana kekuasaan yang korup tidak hanya memanipulasi kebijakan dan anggaran tetapi juga menindas mereka yang berada di lapisan paling bawah dalam struktur sosial. Para pekerja proyek yang sebagian besar berasal dari desa dan memiliki pendidikan rendah menjadi korban ketimpangan ekonomi yang diciptakan oleh struktur birokrasi dan politik pembangunan. Ketimpangan ini tidak hanya tampak dalam distribusi hasil proyek tetapi juga dalam sistem pengupahan dan perlakuan terhadap para buruh.

Istilah *faktor X* menjadi simbol dari korupsi struktural yang menggerogoti dana publik, sehingga gaji pekerja ditekan seminimal mungkin. Dalam konteks sosial Orde Baru, Ahmad Tohari ingin menunjukkan bahwa proyek pembangunan tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan rakyat, melainkan menjadi sarana untuk memperkaya elit politik dan militer. Para pekerja tidak memiliki posisi tawar dan hanya menjadi objek eksploitasi. Situasi ini mencerminkan bentuk kolonialisme internal, di mana negara memperlakukan rakyatnya sendiri sebagai sumber tenaga murah demi menopang kepentingan kekuasaan. Eksploitasi semakin tampak dalam praktik pemotongan upah dan ketidakadilan dalam pelaksanaan proyek, seperti tergambar dalam kutipan berikut:

Mandor sering merasa punya hak menentukan gaji bawahan. Memotong gaji tukang dan kuli menjadi hal biasa. Ironisnya, para tukang dan kuli pun menganggap hal demikian wajar karena mandor lah yang memberi mereka pekerjaan. (Tohari, 2015, p. 167)

Selain upah yang tidak adil, kondisi kerja para buruh juga menunjukkan eksploitasi waktu dan tenaga yang melampaui batas kemanusiaan, hal ini tergambar dalam kutipan berikut:

“Entahlah, mereka selalu menyambut lonceng tanda akhir jam kerja dengan sorakan. Mungkin karena selama bekerja mereka tertekan oleh ketat nya aturan. Atau oleh kenyataan upah yang rendah. Dan mereka akan kembali bekerja untuk lembur yang biasa dimulai jam tujuh malam” (Tohari, 2015, p. 224)

Narasi ini menunjukkan bahwa para pekerja hidup dalam tekanan fisik dan psikologis. Mereka bekerja melebihi jam wajar namun tetap menerima upah rendah dan perlakuan tidak manusiawi. Sorakan pada akhir jam kerja menggambarkan kelelahan sekaligus bentuk protes tersembunyi terhadap sistem kerja yang menindas. Ahmad Tohari dengan halus menyoroti bagaimana pembangunan yang diagungkan oleh pemerintah Orde Baru justru menghasilkan penderitaan bagi rakyat kecil. Proyek jembatan yang seharusnya menjadi simbol kemajuan malah menjadi arena eksploitasi bagi para pekerja yang kehilangan hak dan martabatnya.

Di sisi lain, tokoh Kabul seorang insinyur proyek menyadari ketimpangan tersebut namun tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah keadaan. Posisi Kabul

yang sadar namun tak berdaya menunjukkan bahwa sistem pembangunan Orde Baru dikendalikan oleh kekuasaan yang hegemonik di mana kebenaran dan arah kebijakan hanya ditentukan oleh mereka yang berada di pusat (*the center*). Sebagaimana digambarkan dalam kutipan berikut:

“Aku insinyur. Aku tak bisa menguraikan dengan baik hubungan antara kejujuran dan kesungguhan dalam pembangunan proyek ini dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin.”(Tohari, 2015, p. 39)

Kutipan ini memperlihatkan kebingungan batin Kabul ketika berhadapan dengan sistem pembangunan yang tidak lagi berpihak kepada rakyat. Ia menyadari adanya kesenjangan antara nilai-nilai yang seharusnya melekat pada profesi seorang insinyur seperti kejujuran, kesungguhan dan tanggung jawab sosial dengan praktik pembangunan yang hanya menguntungkan pejabat dan kontraktor. Dalam konteks ini, Kabul menjadi representasi dari rakyat kecil berpendidikan yang masih memiliki kesadaran moral, tetapi terjebak dalam struktur kekuasaan yang menindas. Pekerjaannya yang seharusnya membawa kemaslahatan justru menjauhkan dirinya dari cita-cita sosial yang ia yakini

Dengan demikian, kutipan ini menegaskan bahwa marginalisasi dalam novel *Orang-Orang Proyek* tidak hanya menimpa rakyat kecil atau pekerja kasar, tetapi juga mereka yang masih memiliki nurani dalam tubuh sistem itu sendiri. Melalui tokoh Kabul, Ahmad Tohari menunjukkan bahwa pembangunan Orde Baru telah kehilangan makna sosialnya karena tidak lagi berpihak kepada masyarakat miskin. Dalam perspektif Ashcroft, situasi ini menggambarkan bagaimana kekuasaan *the center* menyingkirkan suara-suara kebenaran dan menggantinya dengan wacana semu tentang kemajuan, menjadikan rakyat termasuk mereka yang beritikad baik sebagai pihak yang termarjinalkan di tanah airnya sendiri.

c. *The Empire Writes Back*: Tokoh Kabul terhadap Penyalahgunaan Wewenang Sistem Orde Baru

Bentuk perlawanan rakyat kecil terhadap sistem kekuasaan yang menindas melalui nilai moral dan kejujuran. Di tengah sistem proyek yang korup dan sarat penyalahgunaan wewenang, muncul tokoh-tokoh seperti Kabul yang mempertahankan integritas dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bentuk *resistance discourse* yaitu perlawanan dari pihak yang terpinggirkan terhadap dominasi

kekuasaan. Hal ini sejalan dengan konsep *The Empire Writes Back* yang dikemukakan oleh (Ashcroft et al., 1989), bentuk perlawanan ini tidak diwujudkan melalui tindakan fisik melainkan melalui kesadaran moral, kritik terhadap ketidakadilan dan peneguhan identitas rakyat kecil di tengah hegemoni negara. Dalam konteks tersebut *writer back* terhadap ideologi politik Orde Baru dengan menampilkan rakyat kecil sebagai agen moral yang menentang kekuasaan korup melalui kebenaran, kejujuran, dan iman sebagai bentuk dekolonisasi wacana pembangunan.

Data berikut memperlihatkan bentuk resistensi ideologis yang dilakukan oleh Kabul terhadap sistem korup dalam proyek-proyek pembangunan pada masa Orde Baru. Dalam kutipan, Kabul dengan tegas menolak instruksi atasannya, Pak Dalkijo untuk menggunakan bahan bangunan bekas demi menghemat anggaran proyek, pada kutipan:

“Pak Dalkijo, saya ingatkan ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1990; pemborong wajib menjamin bangunan yang dikerjakan bisa dimanfaatkan setidaknya selama sepuluh tahun.” (Tohari, 2015, p. 209)

Pernyataan tersebut memperlihatkan keberanian Kabul dalam menegakkan prinsip profesionalitas dan integritas di tengah tekanan struktural. Tindakan ini menjadi simbol perlawanan moral terhadap praktik penyimpangan dan korupsi yang telah menjadi budaya dalam sistem kekuasaan Orde Baru. Selain itu, perlawanan Kabul tidak berhenti pada penolakan semata, tetapi juga diwujudkan melalui keputusan untuk mengundurkan diri dari proyek tersebut. Ungkapan Kabul dalam kutipan:

“Ya, saya tahu. Meskipun begitu saya tidak mau menggunakan besi bekas itu. Bila dipaksakan, lebih baik saya mengundurkan diri” (Tohari, 2015, p. 209)

“Maaf, Pak Dalkijo. Kalau keputusan Anda sudah final, saya pun tak mungkin berubah. Saya tetap mengundurkan diri.” (Tohari, 2015, p. 208)

“Maaf Pak. Keputusan saya tak bisa ditarik lagi. Saya keluar!” (Tohari, 2015, p. 230)

Kutipan tersebut menunjukkan sikap idealisme dan komitmen terhadap nilai kejujuran serta tanggung jawab sosial. Keputusan ini sekaligus menjadi bentuk resistensi aktif terhadap struktur kekuasaan yang korup, karena Kabul memilih keluar dari sistem ketimbang ikut terlibat dalam praktik yang menindas dan

merugikan masyarakat kecil. Dalam hal ini, perlawanan Kabul bukanlah perlawanan fisik, melainkan perlawanan ideologis yang menolak tunduk pada nilai-nilai pragmatis dan materialistis yang melandasi kebijakan pembangunan saat itu. Hal tersebut sudah disadari Kabul yang terlihat melalui kutipan berikut:

“Kini Kabul tahu, yang disebut pembangunan selama ini hanyalah upacara besar untuk menipu rakyat kecil agar tetap tunduk” (Tohari, 2015, p. 249)

Kesadaran kritis Kabul terhadap struktur hegemoni yang beroperasi dalam proyek pembangunan. Ia menyadari bahwa proyek-proyek yang diklaim sebagai “pembangunan” sejatinya hanyalah alat legitimasi kekuasaan negara untuk melanggengkan kepatuhan rakyat. Kesadaran ini menunjukkan bahwa Kabul telah mengalami proses ideologisasi balik dari subjek yang semula terlibat dalam sistem menjadi individu yang sadar akan ketidakadilan di dalamnya.

Secara teoritis, tindakan Kabul dapat dipahami melalui perspektif poskolonial *The Empire Writes Back* (Ashcroft et al., 1989) di mana pihak yang terpinggirkan menggunakan kesadaran dan tindakan untuk menentang dominasi pusat kekuasaan. Dalam konteks ini, Kabul mewakili suara “pinggiran” yang berani menolak nilai-nilai korup yang di institusionalisasi oleh negara. Perlawanan Kabul adalah bentuk *resistance discourse* terhadap hegemoni pembangunan yang menindas, sekaligus upaya menegaskan kembali nilai-nilai kejujuran dan kemanusiaan sebagai identitas alternatif di tengah dominasi ideologi Orde Baru. Dengan demikian, sikap Kabul menandai munculnya kesadaran kolonial terhadap sistem kekuasaan yang telah mengasingkan rakyat kecil dari makna sejati pembangunan.

KESIMPULAN

Novel *Orang-Orang Proyek* karya Ahmad Tohari menggambarkan dinamika kekuasaan dan ketimpangan sosial yang muncul pada masa Orde Baru. Melalui latar pembangunan proyek jembatan, Ahmad Tohari memperlihatkan bagaimana praktik kekuasaan negara bekerja secara hegemonik dengan memunculkan kelas dominan sebagai pusat kendali atas rakyat kecil. Para pejabat proyek, kontraktor dan birokrat digambarkan sebagai representasi sistem yang korup dan penuh kepentingan politik, sedangkan rakyat kecil seperti Martasatang, para pekerja proyek, dan Kabul menjadi pihak yang terpinggirkan dan tereksplorasi. Situasi ini menunjukkan adanya bentuk

kolonialisme internal, di mana kekuasaan negara meniru pola kolonial dalam menindas rakyatnya sendiri atas nama pembangunan.

Berdasarkan teori poskolonial Bill Ashcroft, kondisi tersebut mencerminkan keberlanjutan ideologi kolonial dalam konteks kekuasaan modern. Melalui novel *Orang-Orang Proyek, the empire writes back* terlihat melalui sistem yang korup pada Orde Baru dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang menjunjung nilai kejujuran, moralitas, dan spiritualitas sebagai bentuk *resistance discourse*. Perlawanan Kabul, Pak Tarya, dan rakyat kecil menjadi simbol kebangkitan moral yang menentang struktur kekuasaan yang tidak adil. Dengan demikian, novel ini tidak hanya berfungsi sebagai kritik sosial terhadap ideologi pembangunan Orde Baru, tetapi juga sebagai upaya untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial di tengah praktik kekuasaan yang menindas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A., Muhtar Safari, D., & Mohadib. (2024). Realitas Nilai Moral Dalam Novel Orang-Orang Proyek Karya Ahmad Tohari Kajian Sosiologi Sastra. *Jurnal Bindo Sastra*, 8(1), 62–69. <https://doi.org/10.32502/jbs.v8i1.6661>
- Ashcroft, B., Griffiths, G., & Tiffin, H. (1989). *The Empire Writes Back*.
- Ashcroft, B., Griffiths, G., & Tiffin, H. (2024). Postcolonial Studies: The Key Concepts, Second Edition. *Postcolonial Studies: The Key Concepts, Fourth Edition*, 1–447. <https://doi.org/10.4324/9781003497561>
- Az, A. K. U. (2019). Simbol Dehumanisasi Dalam Novel Orang-Orang. *Jurnal Penelitian, Pendidikan, Dan Pembelajaran*, 13(1), 18–23.
- Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (N.D.). *Novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari (Kajian Analisis Wacana Kritis Michel Foucault)* Achmad. 191–204.
- Juliana, D. (2022). Refleksi Permasalahan Sosial Dalam Novel Orang-Orang Proyek Karya Ahmad Tohari: Kajian Sosiologi Sastra. *Nuansa Indonesia*, 24(November), 149–161.
- Mahadi, M. A. (2020). Praktik Hegemoni Dalam Novel Orang-Orang Proyek Karya Ahmad Tohari (Kajian Hegemoni Gramsci). *Bapala*, 7(1), 1–13.

Suaka, N., Tia, K., & Adinda, W. (2023). Membongkar Kasus Korupsi Orang-Orang Proyekkarya Ahmad Tohari: Kajian Dekonstruksi. *Pedalitra Iii: Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 3(1), 130–138.

Tohari, A. (2015). *Orang-Orang Proyek*.